
Pendidikan Berkelanjutan Dalam Bidang Vokasional

Oleh:
Agus Dudung
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Implikasi kebijakan pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi, perlu disikapi secara kelembagaan yang profesional dan memposisikan pada jalur dan tingkatan kebijakan secara tepat. LPTK-PTK dalam hal ini mempunyai peluang dan mampu berperan serta dengan memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi. LPTK-PTK, dipacu untuk melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan secara komprehensif dan totalitas sebagai wujud pencitraan, guna memperoleh kepercayaan pihak sasaran. Agar pendidikan kejuruan berhasil dalam perannya diperlukan pendekatan yang sistematis dengan lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan seyogyanya berorientasi kepada: 1) perubahan struktur pekerjaan di lapangan, 2) meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, 4) isu tentang berbagai pekerjaan. 5) dampak dari kemajuan teknologi, 6) perubahan sosial, 7) perkembangan teknologi, 8) sistem pendidikan nasional. Tampaknya pendidikan kejuruan berdasarkan kompetensi masih belum di dukung oleh data empiris, belum di dukung oleh perangkat evaluasi yang mapan, belum bertumpu kepada azas pengembangan sumber daya manusia, dan belum pada tahap menguasai pengetahuan dasar akademik profesional pendekatan belajarnya, pada empat pilar belajar, yaitu *learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be*.

Kata kunci: Pendidikan Berkelanjutan, Vokasional.

Pendahuluan

Lulusannya SMK diharapkan mampu mengisi lowongan pekerjaan tingkat menengah sehingga jumlah pengangguran bisa ditekan. Jika ini terpenuhi maka percepatan pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap kerja, cerdas dan kompetitif juga akan tercapai.¹

Implementasi kebijakan ini bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Karena implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh? Apa manfaat dari suatu kebijakan? Bagaimana orang dapat mengembangkan pemahaman, keterampilan dan sikap yang terkait dengan industri? Bagaimana pendidikan menolong siswa dan mahasiswa dalam mengatasi tantangan teknologi dewasa ini? Usaha sistematis apa yang dapat dikembangkan untuk memahami, ketrampilan, dan sikap di sekolah menengah, dan di perguruan tinggi? Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan pendidikan makro berkenaan dengan pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi, diluncurkan pada masa transisi dan perubahan sistem sentralisasi ke desentralisasi. Kenyataan inilah, dapat diindikasikan bahwa dalam implementasinya diperlukan berbagai kekuatan untuk mensinergikan, mengkoordinasikan pada setiap tingkatan kebijakan. LPTK-PTK sebagai pencetak guru, dalam hal ini harus mampu berperanserta dan memberikan kontribusi agar kebijakan tersebut, sesuai dengan tujuan, tepat sasaran, dan dengan mutu pendidikan yang diharapkan masyarakat.

Pembahasan

Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan dan penjamin penyelenggaraan pendidikan telah memberi solusi yang tepat. SMK adalah jawaban yang tepat mengatasi masalah *mismatch* pendidikan dengan dunia kerja dan industri. Harapan terbesar adalah semakin banyak generasi penerus bangsa yang terampil dan memperoleh kehidupan layak. Untuk mencapai kehidupan yang layak itu maka Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya terhadap pembangunan pendidikan masa depan, Salah satu bentuk pendidikan nasional pada jenjang menengah, adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti ditekankan pada pasal 15 yakni;

¹ Jurnalnet.com (Makassar 25/06/2008).

"Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu".¹

Secara konstitusi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SMK mempunyai peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal itu, sejalan dengan kebutuhan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan strategi pembangunan pendidikan nasional, diarahkan pada: (1) perluasan dan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan (3) peningkatan produktivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam suatu pengaturan (*good governance*) pendidikan nasional di semua tingkatan pemerintahan.² Selain itu, adanya semangat yang menjadi komitmen internasional dari pemerintah Indonesia dalam pembangunan kualitas manusia yang berorientasi global. Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah berkenaan dengan SMK masa depan adalah pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi tersebut, tentunya harus sesuai dengan strategi dasar. Artinya banyaknya SMK secara nasional perlu adanya kriteria dan indikator yang jelas, tidak hanya untuk meningkatkan akses dan pemerataan semata-mata, akan tetapi harus berorientasi pada relevansi dan mutu serta memperhitungkan produktivitas dan efisiensi. Demikian pula, keterkaitannya dengan otonomi daerah mengingat ditinjau dari sistem administrasi pemerintahan kabupaten dan kota sangat mempengaruhi administrasi pendidikan yang di dalamnya akan mengatur sumber-sumber daya pendidikan yang mendukung pelaksanaan SMK.

Implementasi kebijakan dipandang dari aspek teori, merupakan alat dan hukum administrasi di mana berbagai organisasi, prosedur, dan teknik harus bekerja sinerjik, terkoordinasi secara sistemik untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena kompleks dalam proses dan keluaran (*output dan outcome*). Anderson³ (1979: 92-93) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu; "*who is involved in policy implementation, the nature of the administrative proces, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact*" (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi kebijakan). Penjelasan tersebut, mengindikasikan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, akan tetapi termasuk jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (*intended*) dan dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*). Konsekuensi dari implementasi kebijakan proporsi tersebut, tentunya pihak-pihak terkait terutama yang berada di kabupaten dan kota perlu ada kejelasan "*frame work*" dari tiap tingkatan pemerintahan, sesuai dengan peraturan yang ada yakni; PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Oleh karena itu masalah mutu pendidikan tidak pernah lepas dan perhatian masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu sumber daya manusia pada khususnya, dan pendidikan pada umumnya, sehingga setiap terjadi perubahan kebijakan bidang pendidikan langsung menjadi sorotan tajam masyarakat. Salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah berkenaan dengan SMK masa depan adalah pendidikan berkelanjutan dalam vokasi. Dalam hal ini, sesuatu dan tepat, karena dunia pendidikan sedang menghadapi masalah, bahwa berlangsungnya dunia pendidikan dianggap kurang bermakna bagi pengembangan pribadi siswa, sedang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti untuk memperkuat kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi kerja sama dan persaingan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan terus, harus diimbangi perubahan berkelanjutan pula dalam hal substansi material yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Jika konsep-konsep baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar

¹ Ibid, h.43.

² Dadang Hidayat, Wowo Sunaryo, *Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan SDM*, makalah yang disampaikan pada Temu Karya Konvensi Nasional APTEKINDO V Padang 5 Juni 2008.h.2

³ Anderson, J.E. *Public Policy Making*. (New York : Hal, Rinehart and Winston. 1979) h. 92-93.

diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan mempunyai dampak besar terhadap pendidikan. Untuk mengisi substansi pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat disesuaikan dengan fokus dan perkembangan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di masa datang. Kecenderungan global kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa merupakan masukan sangat penting dalam menentukan prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sejauh mungkin memenuhi kriteria tepat guna.

Kebijakan pendidikan pada tingkat makro secara hakiki merupakan konsensus dari seluruh komponen bangsa. Setiap kebijakan pada dasarnya adalah untuk memecahkan masalah dalam pendidikan, hal ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang berorientasi terciptanya sumber daya manusia produktif, karena bertolak dari asumsi bahwa SMK dapat memberikan seperangkat kompetensi bagi lulusannya, dengan harapan dapat bekerja di industri atau membuka lapangan kerja mandiri berwirausaha.

Suatu keadaan yang perlu disikapi oleh LPTK-PTK, dalam pengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh berbagai institusi mencakup,

Pertama, berdasarkan analisis posisi tingkatan kebijakan pendidikan dalam konteks sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, mempunyai kompleksitas tinggi sesuai dengan potensi daerah. Dibandingkan dengan pada saat negara kita menganut sentralisasi, kebijakan dapat dilaksanakan dalam satu komando dan manajemen yang terkendali melalui seperangkat petunjuk pelaksanaan dan teknis. Implikasinya kondisi saat ini, pemerintah pusat, provinsi sebagai pelaksana dekonsentrasi dan daerah otonom, perlu adanya tingkatan pemahaman substansi untuk menyamakan persepsi dan penetapan kebijakan.

Kedua, substansi suatu kebijakan pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi pada setiap tingkatan argumen menyangkut konsepsi; (1) informasi yang relevan; (2) tuntutan kebijakan; (3) pembenaran (*warrant*) (4) dukungan (*backing*) (5) bantahan (*rebuttal*) dan (6) syarat (*qualifier*). Dalam hal ini implikasi dari setiap tingkat perlu ada pemahaman yang mendekati kebulatan makna, agar di dalam implementasinya tidak menimbulkan multi tafsir.

Ketiga, standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan, disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respons para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain. Implikasinya adalah setiap tingkatan, perlu memahami adanya standar untuk melaksanakan pengadministrasian sumber-sumber daya pendidikan.

Keempat, implementasi Kebijakan yang ditetapkan, terdapat tahapan, yang bersifat (a) *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya; dan (b) *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks kebijakan, ada indikasi termasuk bersifat *non self-executing*. Implikasinya adalah adanya keterlibatan berbagai pihak, dengan tuntutan kepatuhan yang tinggi.

Kelima, faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber-sumber daya pada setiap tingkatan, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi (sikap) para pelaksana. Implikasinya adalah, kerawanan konflik disfungsi, oleh karena itu perlu adanya penyeimbang mulai dari proses penyusunan program sampai dengan evaluasinya.

Kenyataan ini perlu mendapat perhatian bersama, mengingat belum semua LPTK-PTK memperoleh kesamaan informasi dari kebijakan nasional. Kondisi tersebut, belum semua LPTK-PTK di Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan. Agar LPTK-PTK, dapat memberikan konstribusi dalam implementasi kebijakan pendidikan kejuruan secara nasional, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut; (a) Membangun citra kepercayaan kelembagaan pada setiap tingkatan kebijakan, melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang

perencanaan pendidikan. (b) Membangun jaringan birokrasi pelaksana kebijakan pendidikan, mula dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang negosiasi. (c) Menata sistem manajemen yang transparansi dengan memperhatikan akuntabilitas dan *good governance*. (d) Menata sistem pelayanan pendidikan keguruan melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah, ditinjau dari bidang dan program keahlian yang dibutuhkan. (e) Pengembangan kapasitas kelembagaan (SDM, sarana prasarana, manajemen, pembiayaan, kemitraan dan lain sebagainya).

Pendidikan Berkelanjutan

Pembelajaran dalam Pendidikan Teknik adalah materi ajar tentang proses yang digunakan untuk merencanakan, menciptakan, dan memperhatikan dunia untuk memenuhi tujuan hidupnya (teknologi merancang, mencipta, dan inovasi). Teknologi dikenal dengan "bagaimana" melakukan sesuatu melalui peralatan, mesin, bahan, proses, dan energi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu teknologi tidak memerlukan jawaban bagaimana kerjanya, tidak juga merupakan aplikasi dari science karena kebanyakan teknologi bahkan mendahului ilmu pengetahuan. Oleh karena itu teknologi adalah kombinasi antara ketrampilan, sikap dan ilmu pengetahuan yang lebih berdaya guna dari salah satu komponen saja.

Teknologi yang digunakan oleh industri disebut "*industrial technology*", orang dapat mengembangkan pemahaman, ketrampilan dan sikap yang terkait dengan industri? yaitu melalui pendidikan formal, yang disebut dengan pendidikan kejuruan, pendidikan kejuruan menolong siswa dan mahasiswa dalam mengatasi tantangan teknologi. Usaha-usaha sistematis yang mengantarkan para peserta didik/mahasiswa kesemua maksud tersebutlah yang dinamakan kurikulum. Menurut Soedijarto, kurikulum hakikatnya adalah jalan yang harus ditempuh peserta didik/mahasiswa/peserta, untuk mencapai tujuan suatu program pendidikan/latihan. Karena itu, dalam proses menghasilkan kurikulum, masalah pertama yang harus diselesaikan adalah teridentifikasinya tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh para peserta didik.¹

Perubahan reorientasi pendidikan kejuruan mulai di benahi secara substansial. Perubahan kurikulum mencoba menjawab tantangan tersebut dengan cara menggunakan fasilitas praktek bersama yang di kenal dengan "Balai latihan pendidikan Teknik (BLPT)" dan memberikan penekanan lebih besar kepada praktek.² Dengan demikian pemanfaatan peralatan praktek dapat di tingkatkan. Namun disisi lain menimbulkan dampak yang lebih besar yaitu kebutuhan akan bahan praktek yang makin besar. Pada umumnya sekolah-sekolah kejuruan tidak dapat menyediakan kebutuhan bahan praktek yang diperlukan, dan juga mesin-mesin yang digunakan mulai ketinggalan jaman dan sudah tidak presisi lagi. Akibatnya pada saat sekarang ini, kemampuan lulusan juga tidak memenuhi harapan pasar kerja. Pada tahun 1994, diperkenalkan pada pola "sistem ganda" yang berintikan "*Sharing resources*" dengan industri. Program ini juga gagal karena sulit mendorong industri untuk ikut ambil bagian dalam program mencerdaskan kehidupan bangsa karena belum ada undang-undang yang mengatur kontribusi mereka.

Kalau kita melihat apa yang sudah dibakukan dalam UU RI tentang pendidikan kejuruan. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 20 tahun 2003 TENTANG SISTEM PENNDIDIKAN NASIONAL (Pasal.15) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.³ Mari kita lihat pula PP 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah yang menjelaskan UUSPN No 2 tahun 1989. Penjelasan pada 1.1.3 Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

¹ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008), h.141.

² Aljufri B. S. *Standarisasi Kualitias Pendidikan Teknologi Kejuruan*. Di sampaikan pada: Konvensi Nasional III Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Temu Karya XIV Forum Komunikasi FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP-Se-Indonesia, Gorontalo.(16 Februari 2006)

³ UU RI NO 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .Pasal. 15 (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003).h.43.

Bagaimana artinya dari dua UU tersebut, apakah definisi ini cukup untuk dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan kejuruan? Tidak ada jawaban mengapa mereka bekerja, siapa yang memberikan pekerjaan, dan bagaimana penyelenggaraannya juga tidak dijelaskan. Mari kita bandingkan definisi ini dengan definisi beberapa pakar pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada dunia kerja (industri) sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya (Evans, R. N, & Herr, E. L. 1978)¹ dan (Kazanas, H. C. dan Wolf, L. C. 1973)²

Kazanas, H. C. dan Wolf, L. C. (1973) mengatakan "*The main purposes of vocational and technical education are to help the individual develop desirable and effective work habits and acquire the necessary knowledge and skills of an occupation to either enter and/or make progress in it.*

Kurikulum pendidikan kejuruan hendaknya mengacu kepada empat hal: individu, industri, pengajaran dan lembaga (Calhoun, C. C. & Finch, A. V. 1982)³. Dalam kurikulum kita belum bertumpu kepada bagaimana seseorang memilih karir dan faktor apa yang mempengaruhinya. Tampaknya ada keyakinan bahwa orang dengan mudah dapat dilatih menjadi profesional tertentu tanpa dibutuhkan latarbelakang yang relevan. Latarbelakang yang membuat individu berbeda adalah bakat, kemampuan belajar, nilai yang dipresentasikan dalam raport tiap semester, kondisi fisik (*Physical*), kemampuan berbahasa, latarbelakang rumah tangga, kemampuan menyesuaikan diri baik secara pribadi maupun sosial, pandangannya terhadap pekerjaan, dan latarbelakang pendidikannya.⁴ Dengan mengetahui parameter di atas maka pendidikan kejuruan akan lebih mudah dan lebih murah dilaksanakan. Karena tugas kita hanya mengoptimalkan parameter yang telah dimiliki mereka. Dengan demikian biaya pendidikan akan dapat di minimalkan. Hal ini tidak saja dapat mengoptimalkan kesesuaian pribadi dengan pilihan pekerjaan tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi yang ada.

Apa yang ingin saya sampaikan, yang paling penting mensubsitusikan teknologi dan *science* ke dalam kurikulum pendidikan kejuruan adalah merupakan faktor utama, dan yang tidak kalah penting adalah pembaharuan dimulai dari perguruan tinggi. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menjembatani anak didik untuk memasuki dan berkembang dalam dunia kerja. Oleh karena itu dalam mengembangkan pendidikan kejuruan hendaknya telah diidentifikasi siapa yang memerlukan pekerjaan, apa pekerjaannya, dan apa reward yang akan diperolehnya di masyarakat dan berapa banyak kebutuhan akan tenaga kerja tersebut. Lembaga kerja, dan macam pekerjaan yang akan dikembangkan. Ada enam konsep yang dirumuskan Evans⁵ dalam dunia pendidikan kejuruan:

*Vocational education is economic education as it is geared
to the needs of the job market and thus contributes to national economic strength.*

Konsep pertama, pendidikan dalam pendidikan kejuruan adalah meletakkan dasar-dasar ketrampilan (*basic skills*) yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dilapangan melalui *on the job training*. Selanjutnya dalam memasuki dunia kerja bahwa setiap calon hendaknya memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu dalam pendidikan kejuruan hendaknya melatih seseorang untuk dapat berkompetisi secara fair dilapangan, mereka tahu yang harus menjadi haknya setelah mereka melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian dalam pendidikan kejuruan hendaknya juga di ajarkan hukum perburuhan dan hukum ekonomi yang merupakan dasar-dasar bertindak dalam dunia kerja. Selanjutnya dalam menindak lanjuti konsep pertama ini hendaknya pendidikan kejuruan bukan merupakan pendidikan final tetapi adalah merupakan kegiatan "*exploratory experiences*" penimbaan pengalaman untuk dapat mengambil keputusan bahwa berbagai pekerjaan tersebut dapat di kelompokkan menurut rumpunnya yang memiliki prasyarat tertentu dan membutuhkan pengetahuan, ketrampilan, nilai tertentu pula. Dalam menjodohkan anak didik dengan dunia kerja memberikan pengalaman yang berharga untuk memilih

¹ Evans, R. N. & Herr, E. L. *Foundations of Vocational Education*. (Columbus: Charles E. Merrill. 1978).

² H. C. Kazanas, James N Harris, C. Dale Lemons. *The philosophy and foundation of vocational education*. (New York: MSS Information.1973).

³ Calhoun, C. C. & Finch, A. V. *Vocational Education: Concepts and Operations*.(Belmont, CA: Wadsworth. 1982.)

⁴ Aljufri , *op.cit.*, h. 4

⁵ Evans, R. N. & Herr, E. L. *Foundations of Vocational Education*. (Columbus: Charles E. Merrill. 1978.)

karir yang paling cocok dengan dirinya. Selanjutnya, pendidikan kejuruan berfungsi pula agar pilihan yang di ambilnya harus dapat dinikmati untuk hidup mereka sehingga kehidupan mereka akan meningkat. Oleh karena itu dalam pendidikan kejuruan tidak hanya di ajarkan bagaimana memasuki dunia kerja, tapi juga dilatih agar mereka dapat hidup lebih layak dan lebih baik dari pekerjaan mereka, dan akhirnya, setiap akhir pendidikan kejuruan hendaknya yang terbentuk adalah pandangan mereka tentang pekerjaan.

Vocational education can develop a marketable man by developing his ability to perform skills that extent his utility as a tools of production

Konsep kedua ini mengembangkan sisi lain dari konsep pertama yang meletakkan dasar dan yang membantah isu bahwa pendidikan kejuruan mahal di dibandingkan dengan pendidikan umum. Oleh karena itu dalam perencanaan kurikulum harus di analisis *rate of return* dari pendidikan ini artinya investasi yang telah di tanamkan akan kembali dalam waktu yang relatif lebih pendek. Oleh karena itu konsep-konsep ekonomi dalam pengembangan sistem pendidikan hendaknya diterapkan agar pendidikan kejuruan menjadi efisien dan efektif. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan saya menganjurkan struktur kurikulum pendidikan teknik kejuruan lebih langsing dan lebih fleksibel dengan berbagai situasi sehingga kalau terjadi perubahan kurikulum tidak banyak berubah. Itulah sebabnya harus ada pengelompokan komponen utama kurikulum seperti: *foundations, tools, issues, dan applications*. Akibatnya reference dari materi pembelajaran yang di hasilnya setidaknya di sepakati secara nasional dengan demikian mobilitas siswa akan menjadi lebih mudah.

Vocational education is education for production ot serve the ends of the economic system and is said to have social utility

Dalam kenyataan banyak pendidikan kejuruan hanya bertumpu kepada banyaknya kebutuhan tenaga kerja dan evaluasi pendidikan kejuruan dilihat dari faktor lain. Salah satu standar pendidikan kejuruan hendaknya bukan sekolah tetapi negara. Dengan menggunakan indikator ini bahwa sebagian besar warganegara yang bekerja adalah produk pendidikan kejuruan. Oleh karena indikator penting yang perlu dipakai dalam menetapkan perlu tidaknya materi ajar disampaikan bukan karena ada dosen atau tersedianya perlengkapan laboran tetapi berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut,

Vocational education at the secondary level is concerned with preparation of the individual ofirMal employment

Untuk meletakkan dasar-dasar yang kokoh agar dapat memasuki dunia kerja maka yang perlu dikembangkan adalah kemampuan (*ability*) dan bukan kompetensi dalam bekerja, mengembangkan sikap kerja yang positif terutama mencintai pekerjaan (*desire*) terutama menanamkan konsep bahwa kehidupan akan dapat diperbaiki melalui kerja keras (*hard work*). Semua pekerjaan adalah baik asal dilakukan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan lebih mengutamakan kepada pembentukan nilai dibandingkan dengan peningkatan keterampilan (*broad conceptual frame of reference*).

Vocational education should be oriented to the manpower need of the community.

Untuk memenuhi konsep ini maka peran pendidikan kejuruan justru memantapkan konsep bekerja secara benar, yaitu menjawab mengapa seseorang bekerja, dan bagaimana bekerja tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat termasuk dirinya sendiri. Oleh karena itu pendidikan justru mangajarkan kepada anak didik apa yang sebenarnya yang terjadi yaitu menghapi kenyataan (*reality*), memproyeksikan jenis dan macam pekerjaan di masa depan (*future*), dan kawasan pekerjaannya (*teritorial proximity*), termasuk dampaknya terhadap hubungan sosial (*social completeness*).

Vocational education should be evaluated on the basis of economic efficiency.

Sisi lain dari era revolusi informasi ini adalah penciptaan lapangan kerja baru. ada kecenderungan baru bahwa pekerjaan tidak selalu di kerjakan di kantor tetapi juga di rumah, yang berbentuk *home office*. Perubahan sistem nilai ini tentu harus dijawab oleh sistem pendidikan nasional kita. Materi pelajaran dan teknik mengajarkan tentu juga akan berubah. Kalau selama ini banyak sistem pendidikan melaksanakan melalui formal *interaction*, mungkin dimasa yang akan datang titik berat akan bergeser

kepada *informal interaction*, *Self learning packet*, maka materi pelajaran pada LPTK mungkin harus mempertimbangkan kecenderungan baru ini.

Pengembangan sumberdaya manusia yang kompleks dan mengacu kepada pertumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan inti dari penguasaan teknologi informasi. Dengan demikian akan dapat dirumuskan pengembangan sumberdaya manusia yang cocok adalah mencari, menghimpun, dan mengolah informasi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dan mempertahankan, meningkatkan martabat manusia Indonesia.

Saya kira apabila kita mau memperhatikan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pendidikan kejuruan tersebut mungkin kita akan berhasil mengembangkan pendidikan kejuruan. Jika kita bersandar pada pendapat Soedijarto, bahwa untuk tahap pendidikan guna menguasai pengetahuan dasar akademik profesional pendekatan belajarnya, adalah empat pilar belajar, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Melalui pendekatan ini diharapkan para mahasiswa calon guru dapat menguasai ilmu pengetahuan sebagai *ways of knowing* dan penerapannya sehingga dapat diharapkan tumbuhnya minat yang makin mendalam pada ilmu pengetahuan dan selanjutnya dapat menimbulkan rasa percaya diri¹.

Sasaran Pengembangan

Sasaran utama yang akan dicapai dalam pengembangan staf akademik Pendidikan Teknik Kejuruan adalah untuk mengembangkan kemampuan sehingga dapat bekerja mandiri secara profesional dalam bidangnya masing-masing, dan mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Berangkat dan pemahamannya tentang hakikat perkembangan peradaban, Philip Phenix dikutip dari Soedijarto² mengidentifikasikan enam wilayah yang bermakna dalam menjadikan peserta didik memahami makna dunia di mana mereka hidup dan mengembangkan diri. Keenam wilayah makna tersebut yaitu: *symbolics*, *empirics*, *synnoetics*, *aesthetics*, *ethics*, dan *synoptics (realms of meaning)*, yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

"The first realm, Symbolics, comprises ordinary language, Mathematics, and various types of nondiscursive symbolic forms such as gesture, rituals, rhythmic patterns, and the like. These meaning are contained in arbitrary symbolic structures, with socially accepted rules of formation and transformation created as instrument for the expression and communication of any meaning whatsoever. The second realm, Empirics, includes the science of the physical world, of living things, and of man. These science provide factual descriptions, generalizations, and theoretical formulation and explanations which are based upon observation and experimentation in the world of the matter, life, mind, and society. The third realm, Esthetics, contains the various arts, such as music, the visual arts, the arts of the movement, and literature. Meaning in this realm are concerned with the contemplative perception of particular significant things as unique objectifications of ideated subjectivities. The fourth realm, Synnoetics, embraces what Michael Polanyi calls "personal knowledge" and Martin Buber the "I-Thou" relation. The novel term "synnoetics", which was devised because no existing concept appeared adequate to the type of understanding intended, derives from the Greek synnoesis, meaning "meditative thought," and this in turn is compounded of syn, meaning "with" or "together" and noesis, meaning "cognition". Thus synnoetics signifies "relational insight" or "direct awareness the fifth realm, Ethics, includes moral meaning that express obligation rather than fact, perceptual form, or awareness of relation. In contrast to the sciences, which are concerned with abstract cognitive understanding, to the arts, which express idealized esthetic perceptions, and to personal knowledge, which reflect intersubjective understanding, morality has to do with personal conduct that is based on free, responsible, deliberate decision.

*The sixth realm, Synoptics, refers to meanings that are comprehensively integrative. It include history, religion, and philosophy. Theses discipline combine emperical, esthetic, and synnoetic meanings into coherent whole."*³

Melihat dari uraian diatas maka, materi pembelajaran yang terdapat di dalam kurikulum pendidikan kejuruan demikian luas, karena itu pendidikan kejuruan perlu memilih yang lebih esensial.

¹ Soedijarto. *Op.cit.* h. 202.

² *Ibid.* h.123-124.

Tujuan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Teknik Kejuruan adalah untuk mendidik calon pendidik sekolah kejuruan, dan sekaligus sebagai penyebar luaskan pembaharuan, khususnya untuk pendidikan kejuruan. Perencanaan pendidikan kejuruan adalah suatu proses yang berkelanjutan yang dilaksanakan terus-menerus dan harus memiliki fungsi berikut. (a) Terus meneliti situasi lapangan kerja baik di tingkat daerah maupun ditingkat nasional guna mengidentifikasi karakter murid, sistem pendidikan yang berlaku dan program pendidikan kejuruan yang inovatif. (b) pemamfaatan sumber daya yang tersedia termasuk sumber daya manusia dan sumber daya alam. (c) mengembangkan prosedur, kebijakan, dan konsep-konsep pokok dalam pelaksanaan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; (a) Implikasi kebijakan pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi, perlu disikapi secara kelembagaan yang profesional dan memposisikan pada jalur dan tingkatan kebijakan secara tepat. (b) LPTK-PTK dalam hal ini mempunyai peluang dan mampu berperan serta dengan memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi. (c) LPTK-PTK dalam hal ini, dipacu untuk melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan secara komprehensif dan totalitas sebagai wujud pencitraan, guna memperoleh kepercayaan pihak sasaran dan implementor kebijakan di setiap tingkatan.

Agar pendidikan kejuruan berhasil dalam perannya diperlukan pendekatan yang sistematis dengan lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan seyogyanya berorientasi kepada: 1) perubahan struktur pekerjaan di lapangan, 2) meningkatkan mobilitas manusia, 3) meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada manusia didik, 4) terhadap isu tentang berbagai pekerjaan yang sudah tidak ada lagi (pekerjaan yang telah digantikan oleh mesin). 5) dampak dari kemajuan teknologi, 6) perubahan sosial, 7) perkembangan teknologi, 8) penambahan penduduk, 9) melihat jauh kedepan, dan 10) sistem pendidikan nasional.

Pendidikan dalam pendidikan kejuruan saat ini masih bersifat "*classroom oriented*" dan belum di arahkan kepada "*market oriented*". Pengembangan pendidikan kejuruan saat ini mungkin masih steril terhadap pendekatan kepada lembaga kerja, kepuasan kerja, ketrampilan tepat guna, dan bahkan terhadap kecenderungan siswa/mahasiswa sendiri.

Tampaknya pendidikan kejuruan berdasarkan kompetensi masih belum di dukung oleh data empiris, belum di dukung oleh perangkat evaluasi yang mapan, belum bertumpu kepada azas pengembangan sumber daya manusia, dan belum pada tahap menguasai pengetahuan dasar akademik profesional pendekatan belajarnya, pada empat pilar belajar, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*.

Dalam pelaksanaannya, program pendidikan kejuruan hendaknya terlibat dalam proses:

- (a) Membantu sekolah kejuruan memahami dan mengidentifikasi kebutuhan lapangan pekerjaan.
- (b) mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- (c) melaksanakan program pengajaran
- (d) mengembangkan program pengajaran,
- (e) Merawat dan mensupervisi program pengajaran (f) mengevaluasi dan meningkatkan program kerja.

Daftar Pustaka

Anderson, J.E. *Public Policy Making*. (New York : Hal, Rinehart and Winston. 1979) h. 92-93.

Aljufri B. Syarif. *Kurikulum Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, Makalah Seminar dalam Rangka Konvensi Nasional APTEKINDO V Padang (4 Juni 2008)

_____. *Standarisasi Kualitas Pendidikan Teknologi Kejuruan*. Di sampaikan pada: Konvensi Nasional III Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Temu Karya XIV Forum Komunikasi FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP-Se-Indonesia, Gorontalo. (16 Februari 2006)

-
- Bambang Sudibyo, *Saat membuka LKS SMK ke XVI. Makasar* (25/06/2008)
- Calhoun, C. C. & Finch, A. V. *Vocational Education: Concepts and Operations.*(Belmont, CA: Wadsworth. 1982.)
- Dadang Hidayat, Wowo Sunaryo, *Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan SDM*, makalah yang disampaikan pada Temu Karya Konvensi Nasional APTEKINDO V Padang 5 Juni 2008.h.2
- Evans, R. N. & Herr, E. L. *Foundations of Vocational Education.* (Columbus: Charles E. Merrill. 1978).
- H. C. Kazanas, James N Harris, C. Dale Lemons. *The philosopy and fondatiom of vocational education.* (New York: MSS Information.1973).
- Jurnalnet.com (Makassar 25/06/2008).
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008), h.141.
- UU RI NO 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional .Pasal. 3* (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003).h.7.
- _____, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional .Pasal. 15* (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003).h.43.

